



## Analisis Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masyarakat Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko

Darson<sup>1</sup> • Alexsander<sup>2\*</sup> • Budiman Sakti<sup>3</sup> • Harmiati<sup>4</sup>

**ABSTRACT :** *This study aims to analyze the impact of the Family Hope Program (PKH) on the community of Teras Terunjam Subdistrict, Mukomuko Regency, in terms of policy and budgeting aspects. It also aims to examine the factors that influence the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the community of Teras Terunjam Subdistrict, Mukomuko Regency. To address these issues, the researcher employed a qualitative research method. The results of the study show that the evaluation of the context of service delivery for the Family Hope Program (PKH) in the community of Teras Terunjam Subdistrict, Mukomuko Regency has been generally good. Based on findings from informants, the services provided—from document submission to home surveys—have been carried out according to procedures. Observations and interviews also indicate that the service delivery of the Family Hope Program (PKH) in this area is fairly good, although there are still some instances where certain services provide special treatment for relatives in accessing direct cash assistance.*

**Keywords:** *Policy, Cash Transfer Program, Family Hope Program (PKH)*

©2025 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

---

### PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu kondisi bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaannya dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Hajar et al., 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program yang memberikan bantuan non tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Hajar et al., 2021). Tujuan bantuan tersebut untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama dalam kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat keluarga penerima manfaat (Rahmansyah et al., 2020). Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, mensejahterakan masyarakat miskin dan memotong rantai kemiskinan di Indonesia. PKH juga termasuk program golongan pertama dalam membantu mensejahterakan masyarakat di Indonesia (Purnawan et al., 2022).

Kecamatan Teras Terunjam merupakan daerah Kecamatan ini dibentuk melalui Peraturan Pemerintah (PP) no. 47 tahun 1999, hasil dari pemekaran Kecamatan Mukomuko Utara. Teras Terunjam memiliki banyak sumber daya alam dan perkebunan,



contohnya kelapa sawit dan karet. Sebagian besar penduduk kecamatan ini menggantungkan hidupnya dari perkebunan kelapa sawit. Dengan profil daerah kecamatan teras terunjam ini, Masyarakat sangat terbantu oleh adanya program PKH, pengaruh dan dampak dari program PKH ini berpengaruh terhadap keluarga pada Masyarakat kecamatan teras terunjam kabupaten mukomuko.

Pada table dibawah ini hasil dari penelitian awal terlihat bahwa pada tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2022, 2023, 2024. Yaitu data penerima PKH Kecamatan Teras Terunjam.

**Tabel 1 Daftar Penerima PKH Kecamatan Teras Terunjam**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerima PKH</b>
2022	289 Orang
2023	276 Orang
2024	265 Orang

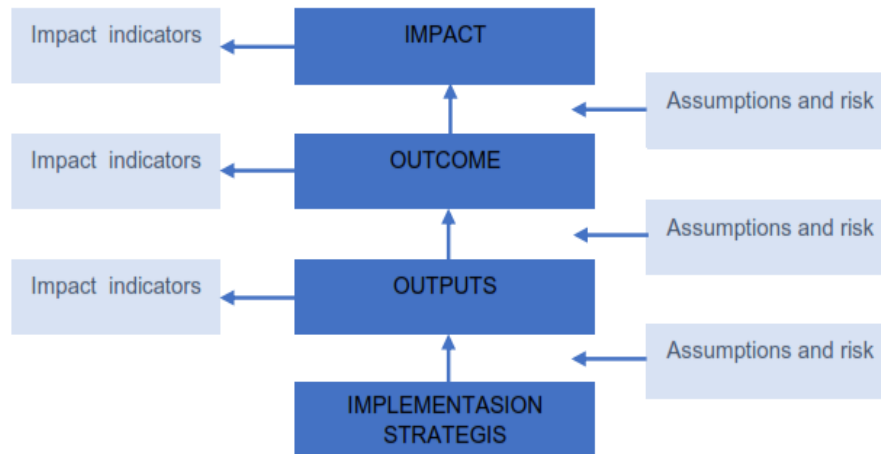
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, 2024

Dari table diatas menunjukkan bahwa terdapat penurunan penerima PKH yang artinya semakin sedikit Tingkat prioritas penerima yang berarti meurunkan mata rantai kemiskinan. Dari Latar Belakang diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Dampak Program Keluarga Harapan Pada Masyarakat Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko”.

(Joshua, 2017) mengungkapkan sebuah metode evaluasi dampak dengan menggunakan pendekatan *theoryof change* atau teori perubahan untuk menjelaskan bagaimana kegiatan dipahami untuk menghasilkan serangkaian hasil yang berkontribusi untuk mencapai dampak akhir yang diinginkan. Ini dapat dikembangkan untuk setiap tingkat intervensi suatu peristiwa, proyek, program, kebijakan, strategi, atau organisasi. Sebuah pendekatan teori perubahan dapat dikembangkan untuk intervensi: dimana tujuan dan kegiatan dapat diidentifikasi dan direncanakan secara ketat sebelumnya, atau yang berubah dan beradaptasi dalam menanggapi isu-isu yang muncul dan keputusan yang dibuat oleh mitra dan pemangku kepentingan lainnya.

Kadang-kadang istilah ini digunakan secara umum untuk merujuk pada versi apapun dari proses ini, termasuk rantai hasil, yang menunjukkan serangkaian kotak dari input hingga output, hasil, dan dampak (lihat Gambar2.1), atau *logframe*, yang mewakili informasi yang sama dalam sebuah matriks.





**Gambar 1 Skema penggambaran teori perubahan**

Kecamatan Teras Terunjam merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Mukomuko yang memiliki persentase luas wilayah sebesar 3,58 persen terhadap luas wilayah Kabupaten Mukomuko. Luas wilayah Kecamatan Teras Terunjam sebesar 1302,75 Ha. Ibukota kecamatan Teras Terunjam adalah Desa Talang Kuning, yang memiliki jarak sekitar 30 kilometer dengan ibukota Kabupaten Mukomuko. Secara geografis, Kecamatan Teras Terunjam berbatasan dengan Kecamatan V Koto di sebelah utara, Kecamatan Air Dikit disebelah selatan, Kecamatan Selagan Raya di sebelah timur, dan Kecamatan Kota Mukomuko di sebelah barat. Desa yang paling jauh jaraknya dari kantor kecamatan yaitu Desa Mekar Jaya yang memiliki jarak sekitar 15 kilometer. Desa yang paling luas wilayahnya dengan 7 050 Ha yaitu Desa Karang jaya. Seluruh desa di Kecamatan Teras Terunjam merupakan desa bukan pantai yang berbukit-bukit dengan tinggi wilayah sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Akses jalan untuk menuju kecamatan ini melalui Kecamatan Penarik memiliki kondisi yang cukup baik..

## METODOLOGI

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merujuk pada Creswell dalam (Purnawan et al., 2024) suatu metode yang diaplikasikan dalam penelitian dengan tujuan melakukan perbaikan, yang selanjutnya diterapkan untuk mengeksplorasi kondisi di mana suatu masalah muncul, di mana peneliti berperan sebagai alat utama (Hadari Nawawi, 1991). (Sriati, 2013) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada data yang bersifat naratif dan bukan numerik; data ini terdiri dari cerita atau peristiwa yang dikumpulkan untuk dianalisis. Metodologi kualitatif digunakan untuk mengumpulkan berbagai isu dan informasi dengan cara yang komprehensif, yang kemudian akan diuraikan atau dijelaskan (Ulber Silalahi, 2012). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian atau problematika yang muncul pada subjek

tertentu, sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh, untuk menghasilkan pemahaman yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2020).

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan berbagai fenomena yang ada, baik yang berkaitan dengan alam maupun teknologi yang diciptakan oleh manusia (Sugiyono, 2017). Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah untuk menyajikan informasi yang terstruktur dengan sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik suatu populasi atau daerah tertentu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk mevaluasi bagaimana pelaksanaan program PKH di Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko baik dari ketepatan sasaran hingga penggunaannya.

Untuk menyusun data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode pengumpulan data (Sugiyono, 2020) sebagai berikut:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumen

## **PEMBAHASAN**

### **1. Terbantunya biaya pendidikan dan kesehatan**

Selain itu, dengan adanya monitoring kehadiran belajar anak di setiap sekolah dalam tiga bulan satu kali, anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memenuhi kewajibannya untuk taat datang ke sekolah dan aktif di sekolahnya dengan minimal kehadiran di sekolahnya sebanyak 85% dari jumlah pertemuan. Dengan adanya bantuan komplementer kartu Program Indonesia Pintar (PIP) bisa meringankan beban keluarga dalam membiayai anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama bersekolah hingga taraf SMA sederajat (Fadhilah, 2018). Bagi anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi bisa melakukan konfirmasi ke pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko. Hal ini untuk membantu dalam proses pendaftaran karena dinas sosial mengadakan kerja sama dengan beberapa universitas untuk penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam teori fungsionalisme struktural Talcott Parson dalam (Junus et al., 2019) dijelaskan bahwasanya terdapat empat konsep kunci dalam fungsionalisme struktural yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency*. Dalam kasus peningkatan pendidikan masyarakat di Kecamatan Teras Terunjam yang merupakan salah satu dampak dari adanya Program Keluarga Harapan merupakan termasuk ke dalam *Goal Attainment*, ini merupakan sebuah tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menangani angka kemiskinan dengan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat di Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten mukomuko Provinsi Bengkulu.



## 2. Peningkatan Aksesibilitas Layanan Kesehatan

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat menggunakan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah, terutama untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Kecamatan Teras Terunjam Kecamatan Teras terunjam Kabupaten Mukomuko. Masyarakat berhak memperoleh dan menggunakan layanan kesehatan tersebut dengan gratis. "bagi KPM yang sedang hamil atau punya balita itu wajib posyandu kak, kalo tidak kita kasih teguran, soalnya dari posyandu juga kita sebagai pendamping bisa dengan mudah memonitoring bagaimana kondisi ibu hamil ini"(Saider, Pendamping PKH)" Selain fasilitas kesehatan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adanya bantuan pangan non tunai yang diberikan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menciptakan pola hidup sehat dan memastikan pemberian makananehat dan asupan gizi bagi anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan juga menjaga kebersihan keluarga dan lingkungan tempat tinggal.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggunakan dana yang didapatkan dengan baik, dimana mereka membagi pendapatan yang didapatkan untuk kebutuhan yang diperlukan, bukan yang diinginkan, terutama memberikan perhatian untuk pendidikan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga penggunaannya sesuai dengan komponen yang sudah didapatkan. Selain itu, ada juga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengelola bantuan uang tunai yang didapatkan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk modal usaha. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Tiroh. "saya, dulu pas beberapa kali dapat PKH ini langsung kepikiran buat jualan sayur kak. Dulukan saya dapat Rp.3000.000 awalnya kecil- kecilan jualan sayur di rumah. Tapi sekarang saya keliling karena Alhamdulillah bisa lebih lengkap sayur yang dijual" (Aripin, Karang Jaya).

Dengan demikian, jika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa memanfaatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan baik mampu menambah pendapatan yang diperoleh dan sedikit demi sedikit kebutuhan anggota keluarga dapat terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan materi, salah satunya yaitu rumah apakah layak untuk dihuni dengan melihat jenis lantai, jenis atap, jenis dinding, jenis penerangan, sumber air minum, dan status kepemilikan tanah. Kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) beserta keluarga sudah cukup, hal ini disampaikan oleh salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan(PKH) diKecamatan Teras Terunjam Kecamatan Teras terunjam Kabupaten Mukomuko "Kondisi saya ya seperti ini kak, mangkanya saya dapat bantuan pemerintah, Alhamdulillah dapat bantuan ini anak saya yang terakhir itu yang nomor 4 Kham dan bisa lulus SMK jurusan motor (otomotif), padahal mas nya yang lain gak ada yang lulus SMP, kalau buat makan sehari-hari buat keluarga cukuplah terpenuhi" (Bapak Kadar, KPM PKH)



Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengatakan bahwa Program keluarga Harapan (PKH) bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki tempat pendidikan yang layak dan bisa menggunakan fasilitas kesehatan yang memadai. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teras Terunjam Kecamatan Teras terunjam Kabupaten Mukomuko juga sudah memberikan dana bantuan secara merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (PKH) Program Keluarga Harapan (PKH) secara merata, sesuai dengan komponen-komponen yang diberikan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teras Terunjam Kecamatan Teras terunjam Kabupaten memberikan kesejahteraan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan fasilitas-fasilitas, dan juga pelayanan-pelayanan, yang dapat digunakan secara mudah dan terbuka oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).

Meningkatkan kemandirian ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan salah satu tujuan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH). Di dalam teori fungsionalisme struktural Talcott Parson terdapat salah satu konsep kunci yang menjelaskan bahwasannya sebuah sistem harus memiliki kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut (Ritzer, 2019). Peningkatan kemandirian ekonomi merupakan tujuan utama yang dirancang oleh Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat, hal tersebut sesuai dengan konsep kunci teori fungsionalisme struktural Talcott Parson yaitu *Goal Attainment* karena meningkatkan kemandirian ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan salah satu tujuan diberlakukannya Program Keluarga Harapan (PKH).

### 3. Merubah Perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Berdasarkan pada uraian sebelumnya terlihat jelas bahwasannya Program Keluarga Harapan (PKH) telah cukup mampu memperbaiki perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan pendidikan dan sadar akan kemudahan akses layanan kesehatan. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari peran pendamping dalam mengedukasi para Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teras Terunjam Kecamatan Teras terunjam Kabupaten Mukomuko. Proses edukasi yang dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Teras Terunjam adalah melalui FDS (*Family Development Session*) yang dilakukan satu kali dalam satu bulan.

Melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagai langkah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam mengurus dan meningkatkan kesejahteraan keluarga baik aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. (Yul Dewi Marta & Nurlitasari, 2021) menjelaskan keberhasilan kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya ditandai dengan meningkatnya taraf kesejahteraan pada komponen kesehatan, pendidikan, dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi juga terjadi perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM).





Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Teras Terunjam Kecamatan Teras terunjam Kabupaten Mukomuko jumlah Penerima Manfaat Program (KPM) pertahun 2022 sejumlah 1.207 Keluarga Penerima Manfaat yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2011 bersamaan dengan kabupaten-kabupaten lain yang berada Jawa Tengah. Adapun jumlah dari penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teras Terunjam terdiri dari beberapa komponen yang di dalamnya ada beberapa kategori. Untuk kategori anak usia sekolah berjumlah 1.595 jiwa, kategori ibu hamil sebanyak 11 jiwa, kategori anak usia dini sebanyak 314 jiwa, untuk kategori lansia sebanyak 179 jiwa, dan untuk kategori disabilitas pada tahun 2022 tidak ada jumlah penerima yang artinya di Kecamatan Teras Terunjam tidak ada masyarakat sebagai penyandang disabilitas.

Dalam teori fungsionalisme struktural Talcott Parson dalam (Ashar & Agustang, 2020) terdapat salah satu konsep kunci yang disebut *Latency* atau pemeliharaan pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, Bahasa, norma, aturan, dan sebagainya (Ritzer, 2019). Peningkatan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan bagian dari pemeliharaan hal-hal atau kebiasaan yang seharusnya dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) ini para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diarahkan untuk terus memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hal tersebut sesuai dengan salah satu konsep kunci teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons yaitu *Latency*.

Data calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) bersumber dari BDT (Basis Data Terpadu) yang terintegrasi dengan data DDKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang ada di Desa, dan pada awal pelaksanaannya data calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada waktu lalu bersumber dari hasil sensusnas BPS yang terakhir. BDT (Basis Data Terpadu) merupakan dari data yang bersumber dari Kementrian Sosial yang diperoleh melalui hasil PPLS 2011, dan sumber data diinput oleh petugas BDT (Basis Data Terpadu) desa yang terhubung ke BDT pusat. Sebagaimana yang disampaikan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teras Terunjam. “awalnya calon penerima manfaat ini harus ada di daftar data BDT, kalau sudah terdaftar BDT pun tidak semua bisa langsung menjadi penerima PKH, karena di BDT juga ada kriterianya kak. Ada desil 1 sampai 4, di desil juga ada pembagiannya lagi dari persentil 1 sampai 10 masuk kedetil 1, persentil 11 sampai 20 masuk ke desil 2 seterusnya pembagiannya sepuluh sepuluh. Nah, untuk kriteria yang tergolong sebagai penerima PKH itu ada dipersentil 1 sampai 4 kao sudah ada di tahap 4 ke atas sudah termasuk mampu” (Ibu Khusnul, Pendamping PKH).

Tidak hanya penambahan penerima manfaat terdapat juga pengurangan jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teras Terunjam . Pada tahun 2020 pengurangan sebanyak 7 penerima manfaat diantaranya 4 meninggal dan 3 dianggap sudah tergolong ke dalam keluarga mampu. Untuk graduasi alami atau meninggal kepesertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) langsung dikeluarkan. Hal tersebut juga disampaikan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Teras



Terunjam dalam wawancara. “untuk yang sudah meninggal itu akan langsung dihapus sebagai peserta PKH kak, karena kan komponen sebagai penerima PKH nya sudah tidak ada ya. Tapi kalau yang meninggal itu salah satu dari orangtuaya tetap dapat, karena masih ada komponen penerima PKH, anaknya sih” (Ibu Khusnul, Pendamping PKH).

Untuk graduasi mandiri di Kecamatan Teras Terunjam jika dianggap mampu dan memiliki aset yang sudah mencukupi, untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dianggap mampu mereka akan dimasukkan ke data peserta yang dibidik untuk diputus kepesertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) kemudian dicari informasinya dengan benar dan tidak dikeluarkan secara langsung. “untuk mengeluarkan peserta yang sudah dianggap mampu saya akan menggali informasi terlebih dahulukak, nyarinya ke orang- orang yang berkaitan dengan penerima ini, kaya ke RT nya, tetangganya, apakah benar penerima ini sudah mampu. Kalau saya sudah mendapatkan informasi baru bisa kita masukkan kedata yang akan dibidik sebagai penerima manfaat yang sudah mampu. Kalau sudah jelas semuanya komponen komponen sebagai penerima manfaat itu sudah tidak ada baru bisa kami berhentikan. Untuk memberhentikan keluarga penerima ini harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari kepesertaan yang telah dibuat oleh saya” (Ibu Khusnul, Pendamping PKH).

Adapun proses dari awal hingga menjadi penerima manfaat Program keluarga Harapan (PKH) adalah, calon penerima manfaat harus terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) Desa yang terhubung ke Basis Data Terpadu (BDT) pusat. Setelah itu, dari pusat akan menentukan pencairan, bahan atau tidaknya atau menunggu kuota yang ada dari kementerian baru data-data penambahan tersebut dikirim ke pihak-pihak yang terkait, mulai dari kementerian koordinator regional, koordinator wilayah, koordinator kabupaten yakni dinas terkait dan terakhir diserahkan ke pendamping untuk validasi kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memvalidasi, pendamping melakukan pertemuan dengan mengirimkan surat undangan pertemuan awal beserta form validasi untuk diisi oleh calon penerima. Dalam pertemuan antara pendamping dengan calon penerima manfaat, peserta harus membawa berkas-berkas yang berupa KK, KTP, dan juga Raport bagi peserta yang memiliki anak di usia sekolah. Untuk mencocokkannya dengan data yang ada di dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Jika sudah terjadi kecocokkan antara data peserta dengan data yang ada di dalam Basis Data Terpadu (BDT) kemudian akan langsung dimasukkan ke dalam aplikasi e-PKH. Setelah dimasukkan ke dalam e-PKH peserta harus menunggu persetujuan berjenjang dari pihak-pihak terkait. Hal tersebut disampaikan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Teras Terunjam. “kalau semua sudah cocok kak antar BDT sama data peserta itu kita harus masukkan data lagi ke aplikasi PKH, kalo sudah dimasukkan juga nggak langsung dapet itu nggak, peserta harus menunggu lagi persetujuan dari koordinator kabupaten sampai kementerian. Kalau sudah disetujui semuanya, baru bisa dibikinkan rekening” (Ibu Khusnul, Pendamping PKH).

Tidak hanya mendapatkan bantuan sosial PKH, berdasarkan hasil observasi di lapangan, keluarga penerima manfaat juga mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)





yang dimulai tahun 2017 yang secara bertahap disalurkan. Selain itu, penerima manfaat juga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar (PIP) yang bisa digunakan secara gratis sesuai dengan peruntukannya. Banyak perubahan yang terjadi semenjak dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2011, yang awalnya tidak ada komponen lanjut usia dan disabilitas sekarang menjadi ada. Penerima manfaat bisa mencairkan dananya melalui ATM (*Automated Teller Machine*) yang bisa dicairkan bertahap dalam satu tahun. Seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sekaligus berfungsi sebagai ATM untuk pencairan dana yang ditransfer bertahap.

Dalam teori fungsionalisme struktural dijelaskan bahwasanya suatu sistem harus menjadi satu kesatuan yang terpadu untuk mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sistem yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Teras Terunjam, tim pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Teras Terunjam telah melakukan beberapa hal yang mampu mendorong pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Teras Terunjam. Hal ini sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Parsons bahwa di dalam sebuah sistem terdapat empat imperative yang harus ada di dalam suatu sistem itu sendiri.

## SIMPULAN

Berdasarkan tahap-tahap penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa dampak pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko diantaranya: 1) Meningkatkan pendidikan masyarakat, Program Keluarga Harapan (PKH) mampu meningkatkan pendidikan masyarakat karena dengan bantuan PKH masyarakat mampu menempuh pendidikan dengan gratis sehingga mereka bisa menuntaskan wajib belajarnya. 2) Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Teras Terunjam mampu meningkatkan pendapatan dan sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dengan mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat mengurangi pengeluaran konsumsi pangan. 3) Faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan teras terunjam Kabupaten mukomuko diantaranya Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Sumber daya manusia dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting karena pendamping merupakan pihak yang memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), memonitor Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan memotivasi agar aktif dalam kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH). Partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Partisipasi aktif dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi faktor pendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan teras terunjam Kabupaten mukomuko. Partisipasi aktif dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah ditentukan dalam kesepakatan maka tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membangun kesadaran keluarga



sangat miskin akan pentingnya kesehatan baik untuk ibu hamil, bayi dan balita serta pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah bisa terpenuhi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ashar, A., & Agustang, A. (2020). DAMPAK SOSIAL DANA DESA DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KALOLA, KECAMATAN MANIANGPAJO, KABUPATEN WAJO. *Jurnal Sosialisasi*, 7(2). [http://apium.um.edu.my/journals/journal\\_usul/No\\_Usul.php](http://apium.um.edu.my/journals/journal_usul/No_Usul.php)
- Fadhilah, N. (2018). Analisis Evaluasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Indonesia. *Skripsi*.
- Hadari Nawawi. (1991). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Hajar, R., Badaruddin, & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *Perspektif*, 10(2), 739–753. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Joshua, B. (2017). *MODEL EVALUASI PROGRAM DALAM PENELITIAN EVALUASI*. 3(1), 111.
- Junus, D., Sahi, N. A., Napir, S., & Marzaman, A. (2019). THE EMPOWERED ANALISIS OF THE LOCAL GOVERNMENT ACHIEVE GOOD GOVERNANCE IN THE DISTRICT OF GORONTALO. In *Proceeding International Conference on Government Leadership and Social Science, at the Sam Ratulangi University, January*, 11–13.
- Purnawan, H., Suwanto, K., Dani, R., & Aprianty, H. (2024). *Evaluation of Samsat Virtu Tax Payment Service Innovations in Increasing Original Regional Income in Bengkulu City*. 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i1.9897>
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 1(4), 159–166.
- Sriati. (2013). Metode Penelitian Sosial. In *Unsri Press* (1st ed., Issue 1).
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. (p. 118).
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian administrasi*. CV. Alfabeta Bandung.
- Ulber Silalahi. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. PT Rafika Aditama.



Yul Dewi Marta, F., & Nurlitasari, R. (2021). Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 47–59. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i1.1870>

